

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PUWOREJO
MENURUT PENGELUARAN

2014-2018



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUWOREJO MENURUT PENGELUARAN

2014-2018

<https://purworejo.dak.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PURWOREJO
MENURUT PENGELUARAN 2014-2018**

Nomor Publikasi : 33060.1905
Katalog BPS : 9302020.3306

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : viii + 56 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Dicetak Oleh:
CV. Berguna

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si

Penyunting:

Arif Soesilo, S.ST

Penulis:

Ismiyantina, A.Md

Pengolah Data:

Visita Arsa Pratiwi, S.ST

GambarKulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

<https://purworejokab.dms.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran 2014-2018 merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Purworejo, September 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Purworejo,


R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Infografis	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2 Kegunaan Statistik PDRB.....	3
BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT).....	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT).....	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP).....	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	14
2.5 Perubahan Inventori.....	18
2.6 Ekspor - Impor.....	22
BAB 3 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DAN JAWA TENGAH	
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	26
3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	28
BAB 4 PERTUMBUHAN EKONOMI PURWOREJO	
4.1 Tinjauan Agregat PDRB Purworejo menurut Pengeluaran.....	32
4.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	34
4.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	35
4.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	36
4.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	37
4.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	38
4.7 Perkembangan Net Ekspor Antardaerah.....	39
PENUTUP	42
LAMPIRAN	44



Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Purworejo

01

Pendahuluan

<https://purworejokab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

02

Metode Estimasi dan Sumber Data

<https://purworejokab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- ❖ Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- ❖ Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- ❖ Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- ❖ Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- ❖ Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- ❖ Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- ❖ Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- ❖ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- ❖ Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- ❖ Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- ❖ Indeks Harga Konsumen (IHK).
- ❖ Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*,
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Kabupaten/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- ❖ LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ❖ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- ❖ setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ❖ kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ❖ istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus

melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- ❖ Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
- ❖ Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- ❖ Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- ❖ Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- ❖ Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan

pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Kabupaten, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kabupaten; PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- ❖ Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- ❖ Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- ❖ Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- ❖ Output Bank Indonesia (BI)
- ❖ Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)**1. Konsep, Definisi dan Cakupan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan

penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- ❖ Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Kabupaten/Kota.
- ❖ Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- ❖ Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri (level Kabupaten).
- ❖ Laporan keuangan perusahaan.
- ❖ Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Kabupaten.
- ❖ IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- ❖ Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas).
- ❖ Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- ❖ Publikasi Statistik Konstruksi.
- ❖ Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

- ❖ Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi

barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang

- eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- ❖ Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- ❖ Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- ❖ Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- ❖ Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- ❖ Data komoditas perkebunan;
- ❖ Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- ❖ Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- ❖ Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan

komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh Ber laku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- ❖ menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- ❖ menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- ❖ menghitung perubahan inventori *adh Ber laku* dengan *meng-inflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori *adh Ber laku* diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh Konstan* dihitung dengan: a. *men-deflate* nilai perubahan inventori *adh Ber laku* dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- ❖ Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- ❖ Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;

- ❖ Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- ❖ Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR - IMPOR

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari Kabupaten tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - ❖ Ekspor antar daerah
 - ❖ Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- ❖ Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- ❖ Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- ❖ Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- ❖ Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- ❖ Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk Kabupaten di jembatan timbang;
- ❖ Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk Kabupaten dari hasil survei.
- ❖ Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://purworejokab.bps.go.id>

03

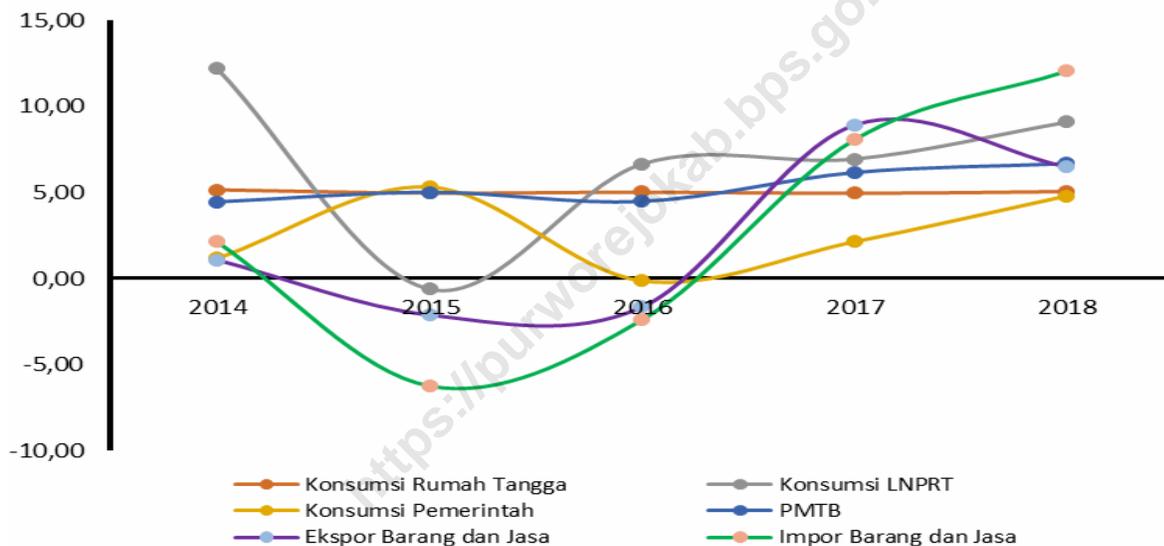
**Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
& Jawa Tengah**

<https://purworejokab.bps.go.id>

3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh semua Komponen Pengeluaran, sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dari tahun 2014 s.d 2018 masing-masing sebesar 5,01 persen (2014); 4,88 persen (2015); 5,03 persen (2016); 5,07 persen (2017); dan 5,17 persen (2018).

Grafik 3.1 Pertumbuhan Nasional dan Komponen Utama Tahun 2014-2018 (%)



Proporsi PKRT Konsumsi akhir rumah tangga merupakan porsi terbesar dalam pengeluaran akhir berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Sehingga mengakibatkan struktur perekonomian Indonesia masih dominan ditopang konsumsi rumahtangga. Selama periode 2014-2018, porsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) terhadap PDB, pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahu 2018, porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 55,74 persen. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 56,66 persen, sedangkan terendah pada tahun 2018 yaitu 55,74 persen.

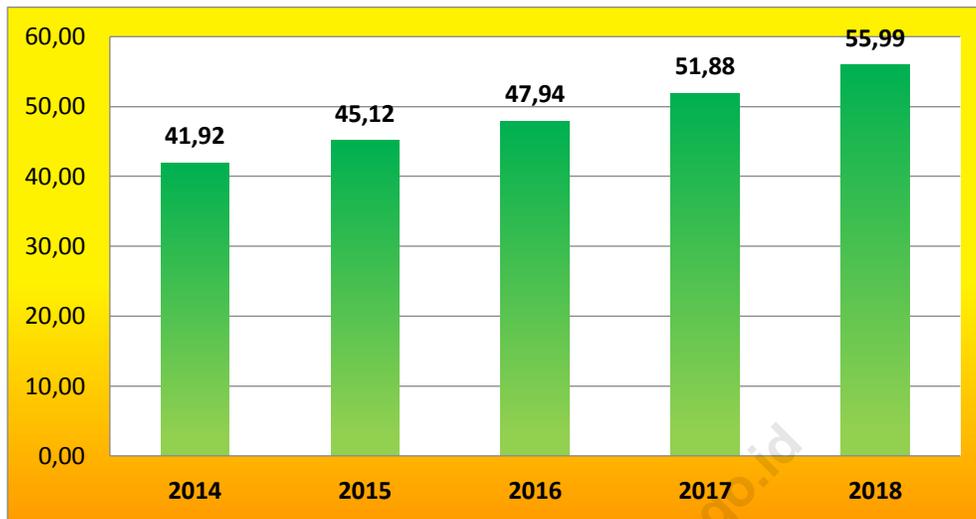
Grafik 3.2 Kontribusi Komponen Pengeluaran Nasional 2018 (%)



PDB per kapita atas dasar harga berlaku (*current price*), secara kumulatif meningkat mulai tahun 2014, dari sebesar 41.915,9 ribu rupiah menjadi 55.986,9 ribu rupiah di tahun 2018. Di mana pada periode tahun 2015 s.d 2017 masing masing tahun meningkat menjadi 45.119,6 ribu rupiah, 47.937,7 ribu rupiah dan 51.881,2 ribu rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDB atau nilai tambah sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara riil membaik meskipun diiringi meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDB per kapita ini berawal dengan besaran 3,61 persen (2014), 3,52 persen (2015), 3,72 persen (2016), 3,79 persen (2017) dan menjadi 3,93 persen (2018). Pertumbuhan per kapita tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,27 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut, tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

Grafik 3.3 Pendapatan per Kapita Nasional 2018 (Juta Rupiah)



3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TENGAH

Pada tahun 2018, perekonomian Jawa Tengah tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,26 persen menjadi 5,32 persen. Kondisi ini sejalan dengan perekonomian nasional yang menguat dari 5,07 persen menjadi 5,17 persen pada tahun 2018. Diantara faktor pendorong menguatnya perekonomian Jawa Tengah adalah menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB non bangunan. Kedua komponen ini pada tahun 2018 tumbuh masing-masing 4,69 persen dan 16,15 persen.

Nilai ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.268,70 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor. Sayangnya ekonomi Jawa Tengah masih tergerus dengan tingginya impor yang besarnya sampai dengan tahun 2018 masih di atas ekspor Jawa Tengah. Namun, sebagian impor merupakan barang modal dan bahan baku sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan *value added*.

Meskipun secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga masih yang terbesar, akan tetapi dalam lima tahun terakhir dominasi peranannya semakin mengecil. Peranan ini diambil alih oleh ekspor dan PMTB yang semakin meningkat. Sementara itu

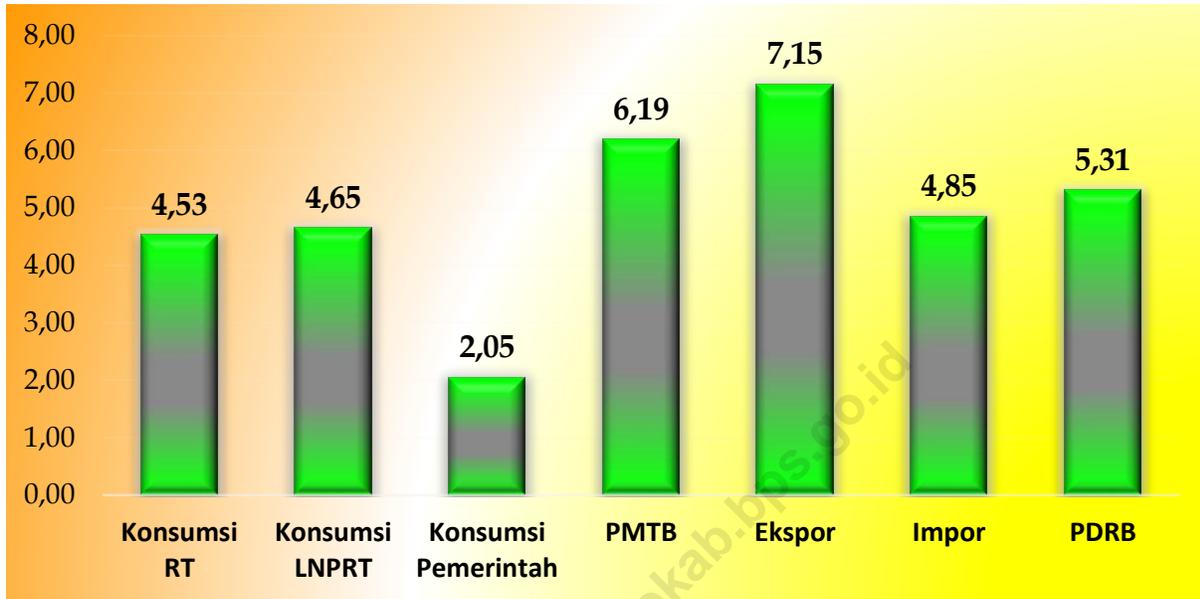
peningkatan peranan ekspor memberi gambaran bahwa pasar ekonomi Jawa Tengah semakin luas, tidak hanya sekedar pasar lokal Jawa Tengah. Peningkatan pasar ini ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Grafik 3.4 Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (persen)



Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah total pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, akan tetapi komponen ini masih menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar terhadap ekonomi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 komponen konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,79 persen terhadap total pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut. Pada tahun sebelumnya andil komponen ini sebesar 2,77 persen terhadap total pertumbuhan. Sementara itu komponen PMTB memberikan andil 2,27 persen pada tahun 2018. Andil komponen ini merupakan yang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dan besaran andilnya mengalami peningkatan. Ini menjadi pertanda bahwa ekonomi Jawa Tengah semakin berkembang dengan ditopang investasi.

Grafik 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB & Rata-rata PDRB Jawa Tengah periode 2014 – 2018 (persen)



04

**Pertumbuhan
Ekonomi Purworejo**

<https://purworejokab.bps.go.id>

4.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PURWOREJO MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Purworejo cenderung meningkat sedikit pada tahun 2018 yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,31 persen menjadi 5,32 persen. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Tengah yang pertumbuhannya semakin menguat dari 5,26 persen pada tahun 2017 menjadi 5,32 persen di tahun 2018. Perekonomian Purworejo ini juga sejalan dengan perekonomian nasional yang menguat dari 5,07 persen menjadi 5,17 persen di tahun 2018. Nilai PDRB Kabupaten Purworejo ADHB selama periode tahun 2014 s.d 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Sejak 2014 agregasi ekonomi Purworejo telah menembus level di atas 12 triliun rupiah. Pada tahun 2018, nilai ekonomi Purworejo mencapai Rp. 17,35 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor. Besarnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencapai 13,57 triliun pada tahun 2018, Pembentukan Modal Tetap Bruto mencapai 4,76 triliun, dan besarnya Ekspor mencapai 4,52 triliun rupiah. Sayangnya ekonomi Purworejo masih tergerus dengan tingginya nilai impor yang besarnya sampai dengan tahun 2018 masih di atas ekspor Purworejo.

Tabel 4.1. Trade Balance Purworejo

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Trade Balance	0,52	0,55	0,57	0,57	0,56

Keterangan :

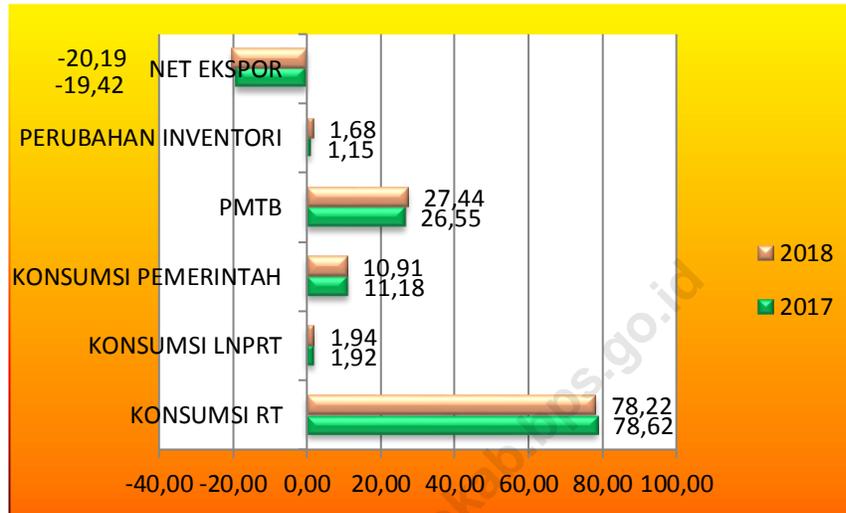
Trade Balance dihitung dengan menggunakan nilai Ekspor dan Impor Purworejo.

Perkembangan *trade balance* Purworejo sejak tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang berarti sampai dengan 2017, namun tahun 2018 sedikit melemah dari nilai 0,57 pada tahun 2017 menurun menjadi 0,56. Semakin nilainya mendekati angka 1 berarti bahwa besaran ekspor semakin meningkat dan mulai mendekati besaran impor.

Meskipun secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga masih yang terbesar, tetapi sejak tahun 2013 hingga 2018 dominasinya berangsur mengecil. Peranan ini

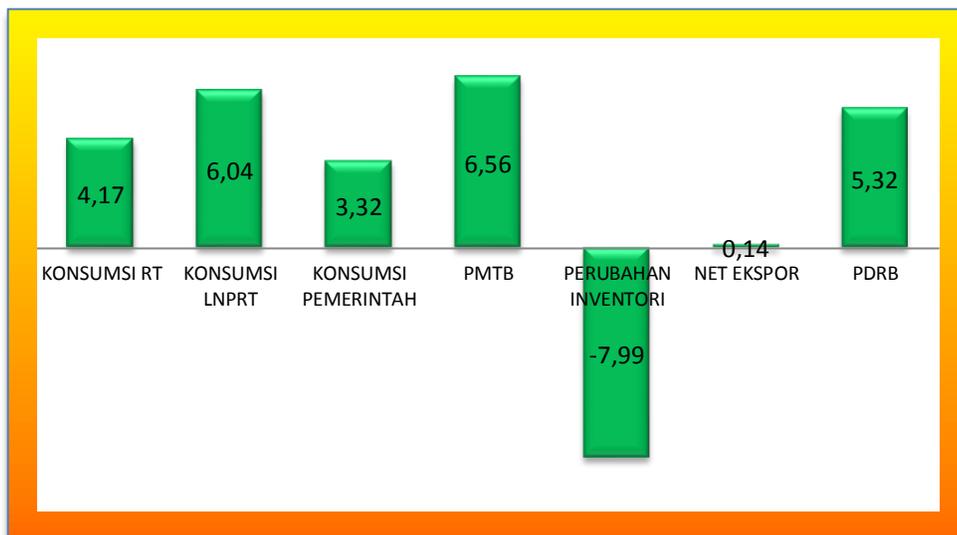
diambil alih oleh PMTB yang semakin meningkat sejak 2014 sampai dengan 2017 meskipun di tahun 2018 melemah.

Grafik 4.1. Perubahan Struktur Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2017 - 2018 (Persen)



PMTB tumbuh 6,56 persen pada tahun 2018 lebih tinggi dari pada empat tahun sebelumnya yaitu 3,23 persen pada tahun 2014, namun melemah pertumbuhannya bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang besarnya 6,87. Sebaliknya konsumsi rumah tangga tumbuh relatif fluktuatif yaitu dikisaran 3 sampai dengan 4 persen dengan rata-rata pertumbuhan masih di bawah pertumbuhan total Purworejo.

Grafik 4.2. Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran 2018 (Persen)



Meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah pertumbuhan ekonomi total, akan tetapi komponen ini masih memberikan laju pertumbuhan diatas 4 persen untuk ekonomi Purworejo selama ini. Pada tahun 2018 komponen ini memberikan laju pertumbuhan sebesar 4,17 persen. Tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan komponen ini antara 3,5 sampai dengan 4,4 persen.

Sementara itu komponen PMTB memberikan laju pertumbuhan 6,56 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan komponen ini merupakan yang terbesar kedua setelah Ekspor.

4.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Purworejo menurut pengeluaran. Konsumsi ini dipenuhi dari produk lokal dan produk impor, baik impor dari luar negeri maupun kabupaten lain. Konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014-2018 yang didorong oleh penambahan jumlah penduduk maupun pendapatan yang semakin membaik.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama periode tahun 2014 s.d 2018 cenderung menurun. Proporsinya pada tahun 2014 merupakan yang paling tinggi yaitu 81,25 persen, sedangkan tahun 2018 dengan porsi 78,22 persen dan merupakan proporsi terendah selama periode tersebut. Penurunan proporsi ini dikarenakan konsumsi rumah tangga yang tumbuh rata-rata di bawah pertumbuhan ekonomi Purworejo (Tabel 4.2)

Tabel 4.2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

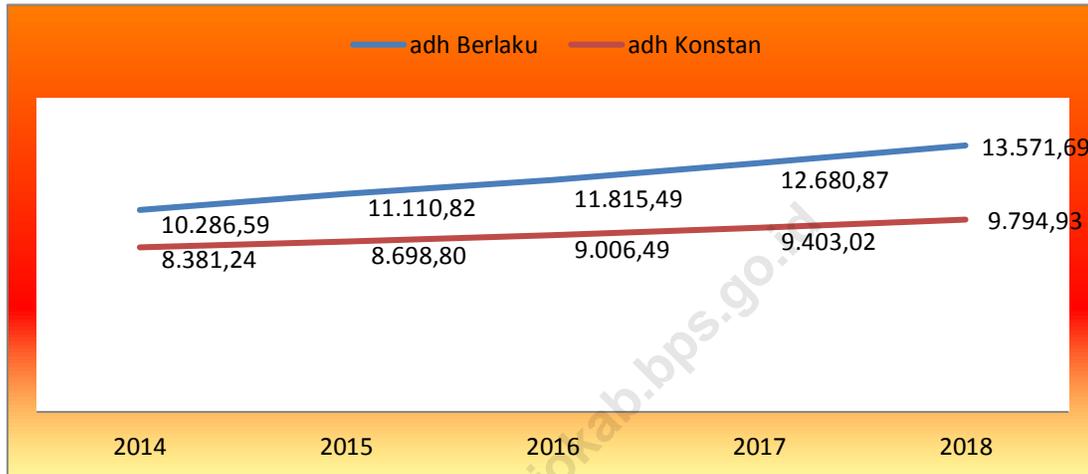
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	10.286,59	11.110,82	11.815,49	12.680,87	13.571,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	8.381,24	8.698,80	9.006,49	9.403,02	9.794,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	81,25	80,13	78,70	78,62	78,22
Pertumbuhan (% ADHK)	3,60	3,79	3,54	4,40	4,17

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan secara total sebesar 3,60 persen pada tahun 2014 dan naik menjadi 4,17 persen pada tahun 2018. Pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif namun masih berkisar antara 3 sampai 4 persen.

Grafik 4.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga



Grafik 4.3 memperlihatkan bahwa perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan berjalan linear sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.

4.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian sehingga ke depannya akan semakin meningkat. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik dan lembaga keagamaan.

**Tabel 4.3. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	252,16	269,23	288,22	309,67	336,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	198,73	195,85	204,72	213,44	226,32
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,99	1,94	1,92	1,92	1,94
Pertumbuhan (% ADHK)	8,61	-1,45	4,53	4,26	6,04

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 4.3 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga (LNPRT) pada tahun 2018 tumbuh 6,04 persen, meningkat bila dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat 4,26 persen.

4.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAHAN

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan untuk adh Berlaku maupun untuk adh Konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1,49 triliun rupiah, terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 1,89 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan yang juga mengalami peningkatan mulai tahun 2014 hingga 2018. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas tahun 2010 di tahun 2018.

Tabel 4.4. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.492,33	1.650,33	1.698,36	1.803,45	1.893,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.139,52	1.176,06	1.178,54	1.212,28	1.252,57
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11,79	11,90	11,31	11,18	10,91
Pertumbuhan (% ADHK)	2,09	3,21	0,21	2,86	3,32

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dari 11,79 persen di tahun 2014 hingga 10,91 persen pada tahun 2018. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2018; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 11,90 persen.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil berfluktuasi. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebesar 3,32 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0,21 persen.

4.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun lembaga non profit), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*.

**Tabel 4.5. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.280,18	3.664,54	3.923,78	4.283,00	4.761,36
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.664,24	2.768,61	2.919,66	3.120,29	3.325,00
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,91	26,43	26,13	26,55	27,44
Pertumbuhan (% ADHK)	3,23	3,92	5,46	6,87	6,56

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014-2017 terus meningkat, namun melemah di tahun 2018 ini dari 6,87 pada tahun 2017 menjadi 6,56 pada tahun 2018. Peranan PMTB dalam PDRB menurut pengeluaran cukup besar dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya selain komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 27,44 persen terhadap total PDRB di tahun 2018.

4.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 proporsinya sebesar 1,68 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun yang tertinggi sebesar 3,82 persen terjadi pada tahun 2014 (Tabel 4.6).

**Tabel 4.6 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	483,74	212,25	124,60	185,54	290,76
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	267,72	74,90	67,44	87,24	80,27
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,82	1,53	0,83	1,15	1,68
Pertumbuhan (% ADHK)	-18,00	-72,02	-9,97	29,37	-7,99

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

4.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Komponen Net Ekspor secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antardaerah dan impor antardaerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antardaerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antardaerah lebih besar dari pada impor antardaerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 4.7. Net Ekspor Antardaerah Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	-3.134,57	-3.041,54	-2.836,58	-3.132,53	-3.503,31
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-2.338,51	-2.051,58	-1.955,31	-2.008,08	-2.010,97
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-24,76	-21,94	-18,89	-19,42	-20,19
Pertumbuhan (% ADHK)	-3,59	-12,27	-4,69	2,70	0,14

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Kontribusi net-ekspor antardaerah dalam kurun waktu 2014-2018 selalu bernilai negatif, baik adh Berlaku maupun adh Konstan. Hal ini menunjukkan nilai ekspor antardaerah lebih kecil dari nilai impornya, atau dapat dikatakan bahwa perdagangan antardaerah Purworejo dengan kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi lain belum pernah mengalami surplus (Tabel 4.7). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat Purworejo masih sangatlah bergantung pada barang-barang dari luar Purworejo khususnya produk kebutuhan barang-barang pribadi maupun rumah tangga lainnya.

Penutup

<https://purworejokab.bps.go.id>

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	570 433 401,17	620 264 015,08	660 988 585,60	714 362 513,26	768 534 013,68
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	223 433 996,01	241 717 816,44	259 258 447,32	274 574 689,03	295 420 925,86
1.b. Pakaian & Alas Kaki	23 101 565,24	24 921 100,82	26 407 921,08	28 281 596,66	30 181 038,87
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	75 157 809,73	80 571 513,88	85 091 159,83	92 253 817,17	98 411 407,25
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	44 040 386,25	47 901 209,99	51 868 887,29	56 663 508,95	62 327 768,24
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	148 234 320,23	162 807 624,49	170 192 764,50	188 461 358,50	200 275 019,64
1.f. Hotel dan Restoran	44 857 393,88	49 597 279,55	54 616 926,16	59 685 850,10	65 937 146,61
1.g. Lainnya	11 607 929,82	12 747 469,90	13 552 479,42	14 441 692,84	15 980 707,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	10 773 169,95	11 438 504,86	12 256 988,86	13 168 406,66	14 491 861,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	75 556 448,86	85 225 912,08	87 589 147,24	94 261 559,47	98 712 448,72
3.a. Konsumsi Kolektif	36 965 888,61	41 470 008,12	43 062 554,36	47 239 879,42	50 164 356,29
3.b. Konsumsi Individu	38 590 560,25	43 755 903,96	44 526 592,87	47 021 680,04	48 548 092,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	274 558 464,44	308 702 422,26	333 977 417,78	366 766 466,19	413 749 152,51
4.a. Bangunan	230 357 921,06	262 657 557,47	285 665 294,88	313 778 521,65	348 207 109,97
4.b. Non-Bangunan	44 200 543,38	46 044 864,79	48 312 122,90	52 987 944,54	65 542 042,54
5. Perubahan Inventori	27 054 492,95	14 268 808,01	7 307 461,46	9 627 927,57	15 699 070,45
6. Ekspor Luar Negeri	84 542 041,54	92 813 475,63	92 562 664,12	106 463 040,81	124 316 368,45
6.a. Barang	82 998 398,69	91 347 308,64	90 983 082,28	104 606 263,31	122 371 362,75
6.b. Jasa	1 543 642,85	1 466 166,99	1 579 581,84	1 856 777,50	1 945 005,70
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	220 421 202,37	188 360 108,73	134 238 540,27	160 854 809,28	234 958 244,33
7.a. Barang	214 880 713,80	183 167 186,84	129 581 992,02	155 618 957,45	228 304 234,81
7.b. Jasa	5 540 488,57	5 192 921,89	4 656 548,25	5 235 851,83	6 654 009,52
8. Net Ekspor Antar Daerah	99 974 364,58	66 633 607,99	26 872 957,89	28 605 377,79	68 156 294,59
8.a. Ekspor	283 865 284,88	293 247 938,72	317 099 547,67	357 670 341,40	413 585 900,90
8.b. Dikurangi Impor	183 890 920,30	226 614 330,73	290 226 589,78	329 064 963,60	345 429 606,31
PDRB	922 471 181,11	1 010 986 637,17	1 087 316 682,68	1 172 400 482,46	1 268 700 965,90
*) Angka sementara					
**) Angka sangat sementara					

Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	465 234 025,51	485 947 261,60	508 104 938,07	531 583 769,93	556 540 857,90
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	170 340 913,00	175 804 134,29	181 801 772,75	188 107 087,72	194 498 117,16
1.b. Pakaian & Alas Kaki	21 529 076,43	22 764 924,31	23 752 869,82	25 013 850,38	26 313 431,65
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	60 210 684,08	62 757 349,17	65 316 840,75	67 708 235,52	70 863 454,47
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	37 583 817,20	39 538 378,88	41 717 214,99	43 668 199,77	46 230 002,87
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	129 562 704,72	136 361 491,15	143 501 610,18	151 155 949,07	158 657 676,81
1.f. Hotel dan Restoran	36 275 594,28	38 447 962,36	41 322 562,26	44 594 781,17	48 082 277,50
1.g. Lainnya	9 731 235,79	10 273 021,43	10 692 067,32	11 335 666,29	11 895 897,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8 299 374,14	8 047 359,33	8 498 966,46	8 875 109,84	9 551 013,79
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	56 643 274,58	58 117 816,00	57 782 238,48	59 554 139,03	61 329 149,19
3.a. Konsumsi Kolektif	27 526 570,13	28 327 238,23	28 309 016,76	29 463 676,76	30 668 317,40
3.b. Konsumsi Individu	29 116 704,45	29 790 577,77	29 473 221,72	30 090 462,27	30 660 831,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	220 772 866,07	232 335 202,14	246 247 088,50	264 716 106,23	285 045 112,84
4.a. Bangunan	185 636 014,30	198 694 358,15	212 335 096,24	228 471 895,65	242 834 510,40
4.b. Non-Bangunan	35 136 851,77	33 640 843,99	33 911 992,26	36 244 210,58	42 210 602,45
5. Perubahan Inventori	16 261 492,29	5 076 120,24	7 576 171,00	7 952 832,63	8 423 389,98
6. Ekspor Luar Negeri	68 523 198,10	68 716 855,83	66 644 884,59	75 670 847,70	84 767 418,95
6.a. Barang	67 404 214,99	67 772 809,35	65 663 010,14	74 544 700,11	83 632 479,23
6.b. Jasa	1 118 983,10	944 046,47	981 874,45	1 126 147,59	1 134 939,72
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	118 498 481,18	99 894 365,55	95 528 921,75	104 677 125,70	138 816 755,54
7.a. Barang	114 595 151,90	96 499 234,76	92 240 007,60	101 147 648,47	134 602 858,04
7.b. Jasa	3 903 329,28	3 395 130,79	3 288 914,15	3 529 477,23	4 213 897,50
8. Net Ekspor Antar Daerah	47 723 401,45	48 418 842,59	49 773 989,35	50 074 757,51	74 443 091,2
8.a. Ekspor	193 685 332,23	220 538 333,16	239 921 156,43	253 564 601,67	282 076 525,5
8.b. Dikurangi Impor	145 961 930,78	172 119 490,57	190 147 167,09	203 489 844,16	207 633 434,3
PDRB	764 959 150,95	806 765 092,17	849 099 354,69	893 750 437,17	941 283 278,28
*) Angka sementara					
**) Angka sangat sementara					

Lampiran 3.		Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah				
		Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (persen)				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	61,84	61,35	60,79	60,93	60,58	
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	24,22	23,91	23,84	23,42	23,29	
1.b. Pakaian & Alas Kaki	2,50	2,47	2,43	2,41	2,38	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,15	7,97	7,83	7,87	7,76	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,77	4,74	4,77	4,83	4,91	
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	16,07	16,10	15,65	16,07	15,79	
1.f. Hotel dan Restoran	4,86	4,91	5,02	5,09	5,20	
1.g. Lainnya	1,26	1,26	1,25	1,23	1,26	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,17	1,13	1,13	1,12	1,14	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,19	8,43	8,06	8,04	7,78	
3.a. Konsumsi Kolektif	4,01	4,10	3,96	4,03	3,95	
3.b. Konsumsi Individu	4,18	4,33	4,10	4,01	3,83	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,76	30,53	30,72	31,28	32,61	
4.a. Bangunan	24,97	25,98	26,27	26,76	27,45	
4.b. Non-Bangunan	4,79	4,55	4,44	4,52	5,17	
5. Perubahan Inventori	2,93	1,41	0,67	0,82	1,24	
6. Ekspor Luar Negeri	9,16	9,18	8,51	9,08	9,80	
6.a. Barang	9,00	9,04	8,37	8,92	9,65	
6.b. Jasa	0,17	0,15	0,15	0,16	0,15	
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	23,89	18,63	12,35	13,72	18,52	
7.a. Barang	23,29	18,12	11,92	13,27	18,00	
7.b. Jasa	0,60	0,51	0,43	0,45	0,52	
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,84	6,59	2,47	2,44	5,37	
8.a. Ekspor	30,77	29,01	29,16	30,51	32,60	
8.b. Dikurangi Impor	19,93	22,42	26,69	28,07	27,23	
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
*) Angka sementara						
***) Angka sangat sementara						

Lampiran 4.		Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah				
		Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (persen)				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4,31	4,45	3,41	3,47	3,40	
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,74	3,21	4,34	5,31	5,20	
1.b. Pakaian & Alas Kaki	4,56	5,74	4,08	3,66	4,66	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,11	4,23	5,51	4,68	5,87	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	5,20	5,24	5,33	4,96	
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	5,41	5,25	7,48	7,92	7,82	
1.f. Hotel dan Restoran	6,82	5,99	4,08	6,02	4,94	
1.g. Lainnya	4,11	5,57	4,56	4,62	4,69	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8,62	-3,04	5,61	4,43	7,62	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,19	2,60	-0,58	3,07	2,98	
3.a. Konsumsi Kolektif	2,23	2,91	-0,06	4,08	4,09	
3.b. Konsumsi Individu	2,15	2,31	-1,07	2,09	1,90	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,52	5,24	5,99	7,50	7,68	
4.a. Bangunan	6,49	7,03	6,87	7,60	6,29	
4.b. Non-Bangunan	-4,79	-4,26	0,81	6,88	16,46	
5. Perubahan Inventori	-22,63	-68,78	49,25	4,97	5,92	
6. Ekspor Luar Negeri	10,66	0,28	-3,02	13,54	12,02	
6.a. Barang	11,62	0,55	-3,11	13,53	12,19	
6.b. Jasa	-27,07	-15,63	4,01	14,69	0,78	
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-7,29	-15,70	-4,37	9,58	32,61	
7.a. Barang	-7,37	-15,79	-4,41	9,66	33,08	
7.b. Jasa	-4,85	-13,02	-3,13	7,31	19,39	
8. Net Ekspor Antar Daerah	-6,80	1,46	2,80	0,60	48,66	
8.a. Ekspor	-2,50	13,86	8,79	5,69	11,24	
8.b. Dikurangi Impor	-1,01	17,92	10,47	7,02	2,04	
PDRB	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32	
*) Angka sementara						
***) Angka sangat sementara						

Lampiran 5.		Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (Tahun 2010=100)				
		Jawa Tengah menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	122,61	127,64	142,61	145,97	151,89	
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	131,17	137,49	111,18	113,06	114,70	
1.b. Pakaian & Alas Kaki	107,30	109,47	130,27	136,25	138,87	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	124,82	128,39	124,33	129,76	134,82	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	117,18	121,15	118,60	124,68	126,23	
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	114,41	119,39	132,17	133,84	137,13	
1.f. Hotel dan Restoran	123,66	129,00	126,75	127,40	134,34	
1.g. Lainnya	119,29	124,09	142,61	145,97	151,89	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	129,81	142,14	144,22	148,37	151,73	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	133,39	146,64	151,58	158,28	160,96	
3.a. Konsumsi Kolektif	134,29	146,40	152,12	160,33	163,57	
3.b. Konsumsi Individu	132,54	146,88	151,07	156,27	158,34	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	124,36	132,87	135,63	138,55	145,15	
4.a. Bangunan	124,09	132,19	134,54	137,34	143,39	
4.b. Non-Bangunan	125,80	136,87	142,46	146,20	155,27	
5. Perubahan Inventori	166,37	281,10	96,45	121,06	186,37	
6. Ekspor Luar Negeri	123,38	135,07	138,89	140,69	146,66	
6.a. Barang	123,14	134,78	138,56	140,33	146,32	
6.b. Jasa	137,95	155,31	160,87	164,88	171,38	
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	186,01	188,56	140,52	153,67	169,26	
7.a. Barang	187,51	189,81	140,48	153,85	169,61	
7.b. Jasa	141,94	152,95	141,58	148,35	157,91	
8. Net Ekspor Antar Daerah	209,49	137,62	53,99	57,13	91,55	
8.a. Ekspor	146,56	132,97	132,17	141,06	146,62	
8.b. Dikurangi Impor	125,99	131,66	152,63	161,71	166,37	
PDRB	120,59	125,31	128,06	131,18	134,78	
*) Angka sementara						
***) Angka sangat sementara						

Lampiran 6.		Andil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen)				
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2,64	2,71	2,75	2,77	2,79	
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	0,66	0,77	0,81	0,81	0,79	
1.b. Pakaian & Alas Kaki	0,11	0,14	0,11	0,13	0,12	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,42	0,34	0,32	0,29	0,36	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,19	0,25	0,26	0,23	0,29	
1.e. Transportasi, Kounikasi, Rekreasi dan Budaya	0,87	0,85	0,82	0,86	0,78	
1.f. Hotel dan Restoran	0,33	0,29	0,38	0,40	0,41	
1.g. Lainnya	0,05	0,07	0,05	0,07	0,06	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,09	-0,03	0,06	0,04	0,08	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,17	0,19	-0,04	0,21	0,20	
3.a. Konsumsi Kolektif	0,08	0,10	-0,03	0,14	0,13	
3.b. Konsumsi Individu	0,08	0,09	-0,01	0,07	0,06	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,31	1,51	1,72	2,18	2,27	
4.a. Bangunan	1,56	1,71	1,69	1,90	1,61	
4.b. Non-Bangunan	-0,24	-0,20	0,03	0,27	0,67	
5. Perubahan Inventori	-0,65	-1,46	0,31	0,04	0,05	
6. Ekspor Luar Negeri	0,91	0,03	-0,26	1,06	1,02	
6.a. Barang	0,97	0,05	-0,26	1,05	1,02	
6.b. Jasa	-0,06	-0,02	0,00	0,02	0,00	
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-1,28	-2,43	-0,54	1,08	3,82	
7.a. Barang	-1,25	-2,37	-0,53	1,05	3,74	
7.b. Jasa	-0,03	-0,07	-0,01	0,03	0,08	
8. Net Ekspor Antar Daerah	-0,48	0,09	-0,17	0,04	2,73	
8.a. Ekspor	-0,68	3,51	2,40	1,61	3,19	
8.b. Dikurangi Impor	-0,20	3,42	2,23	1,57	0,46	
PDRB	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32	
*) Angka sementara						
***) Angka sangat sementara						

Lampiran 7. Produk Domestik Regional Bruto Purworejo Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.286.587,31	11.110.817,11	11.815.487,41	12.680.870,79	13.571.689,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	252.159,52	269.233,73	288.221,29	309.667,16	336.039,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.492.331,92	1.650.334,09	1.698.355,86	1.803.454,29	1.893.462,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.280.176,50	3.664.544,49	3.923.784,16	4.282.999,42	4.761.359,03
5. Perubahan Inventori	483.738,66	212.252,23	124.600,34	185.538,36	290.757,71
6. Net Ekspor	-3.134.574,94	-3.041.538,03	-2.836.576,71	-3.132.529,03	-3.503.314,95
PDRB	12.660.418,96	13.865.643,62	15.013.872,35	16.130.000,99	17.349.993,77

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Produk Domestik Regional Bruto Purworejo Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.381.238,89	8.698.804,80	9.006.491,82	9.403.019,70	9.794.929,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	198.733,91	195.848,78	204.724,37	213.436,80	226.320,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.139.515,85	1.176.058,40	1.178.543,80	1.212.279,04	1.252.570,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.664.237,66	2.768.607,17	2.919.663,12	3.120.291,91	3.325.000,77
5. Perubahan Inventori	267.724,19	74.904,75	67.437,66	87.243,42	80.272,13
6. Net Ekspor	-2.338.512,71	-2.051.577,92	-1.955.308,55	-2.008.080,50	-2.010.974,76
PDRB	10.312.937,79	10.862.645,98	11.421.552,22	12.028.190,37	12.668.117,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Distribusi PDRB Purworejo ADH Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,25	80,13	78,70	78,62	78,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,99	1,94	1,92	1,92	1,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,79	11,90	11,31	11,18	10,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,91	26,43	26,13	26,55	27,44
5. Perubahan Inventori	3,82	1,53	0,83	1,15	1,68
6. Net Ekspor	-24,76	-21,94	-18,89	-19,42	-20,19
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADH Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,60	3,79	3,54	4,40	4,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,61	-1,45	4,53	4,26	6,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,09	3,21	0,21	2,86	3,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,23	3,92	5,46	6,87	6,56
5. Perubahan Inventori	-18,00	-72,02	-9,97	29,37	-7,99
6. Net Ekspor	-3,59	-12,27	-4,69	2,70	0,14
PDRB	4,48	5,33	5,15	5,31	5,32

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 11. Indeks Harga Implisit PDRB Purworejo (tahun 2010=100) menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	122,73	127,73	131,19	134,86	138,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	126,88	137,47	140,79	145,09	148,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	130,96	140,33	144,11	148,77	151,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	123,12	132,36	134,39	137,26	143,20
5. Perubahan Inventori	180,69	283,36	184,76	212,67	362,21
6. Net Ekspor	134,04	148,25	145,07	156,00	174,21
PDRB	122,76	127,65	131,45	134,10	136,96

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 12. Andil Pertumbuhan PDRB Purworejo menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,64	4,27	4,06	4,15	4,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,49	0,58	0,53	0,54	0,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,16	1,36	1,32	1,38	1,40
5. Perubahan Inventori	0,12	0,04	0,03	0,04	0,03
6. Net Ekspor	-1,02	-1,01	-0,88	-0,89	-0,84
PDRB	4,48	5,33	5,15	5,31	5,32

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURWOREJO
BPS-Statistics of Purworejo Regency

Jl. Banyuurip Purworejo, 54171 Purworejo

Telp (62-275) 321218, Faks (62-275) 321218, email : bps3306@bps.go.id

<https://purworejokab.bps.go.id>